

MANAJEMEN PEMANGKU PADA PURA AGUNG JAGATNATHA DI KABUPATEN BULELENG, BALI

Ni Kade Adi Juli Arsani¹, Nengah Bawa Atmadja², Nyoman Miarta Putra³

STAHN Mpu Kuturan Singaraja^{1,2,3}

Email: juliarsani1985@gmail.com¹, nengah.bawa.atmadja@gmail.com²,
miartaputra78@gmail.com³.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Manajemen Pemangku pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng, Bali" yang bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama, yaitu: (1) alasan maknawi seseorang menjadi Pemangku di Pura Agung Jagatnatha; (2) sistem manajemen Pemangku yang diterapkan; dan (3) status serta peran Pemangku dalam pelaksanaan manajemen ritual di pura tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan sebagai data primer, serta dokumentasi dan sumber tertulis lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan maknawi menjadi Pemangku di Pura Agung Jagatnatha dilandasi oleh panggilan spiritual, keikhlasan dalam pengabdian, serta dorongan untuk menjaga nilai-nilai suci dalam tradisi Hindu Bali. Sistem manajemen Pemangku di pura ini bersifat formal dan modern, proses pengangkatan Pemangku dilakukan melalui SK Bupati Buleleng, bukan melalui proses tradisional seperti nyanjan. Hal ini sejalan dengan struktur kepengurusan pura yang terdiri dari unsur pemerintah daerah. Dalam konteks manajemen ritual, Pemangku memegang peran sentral sebagai pemimpin upacara keagamaan, sekaligus sebagai figur religius yang mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak dari berbagai instansi pemerintahan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa manajemen Pemangku di Pura Agung Jagatnatha merupakan bentuk adaptasi budaya dan spiritualitas Hindu Bali dalam konteks kelembagaan modern.

Kata Kunci: Manajemen, Pemangku, Pura Agung Jagatnatha

Abstract

This research is titled "Management of Pemangku at Pura Agung Jagatnatha in Buleleng Regency, Bali," which aims to examine three main aspects, namely: (1) the spiritual reasons for someone becoming a Pemangku at Pura Agung Jagatnatha; (2) the Pemangku management system implemented; and (3) the status and role of Pemangku in the implementation of ritual management at the temple. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through direct field observation as primary data, as well as documentation and other written sources as secondary data. The research results show that the spiritual reasons for becoming a Pemangku at Pura Agung Jagatnatha are based on a spiritual calling, sincerity in service, and the drive to uphold sacred values in the Balinese Hindu tradition. The management system of the Pemangku at this temple is formal and modern, with the appointment process carried out through the Buleleng Regent's Decree, rather than through traditional processes like nyanjan. This is in line with the temple's management structure, which includes elements of the local government. In the context of ritual management, the Pemangku holds a central role as the leader of religious ceremonies, while also serving as a religious figure capable of communicating and establishing relationships with parties from various government agencies. This research provides an understanding that the management of Pemangku at Pura Agung Jagatnatha is a form of adaptation of Balinese Hindu culture and spirituality within the context of modern institutions.

Keywords: Management, Pemangku, Pura Agung Jagatnatha

PENDAHULUAN

Suatu organisasi pada dasarnya sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya. Organisasi yang merupakan suatu pola hubungan-hubungan yang mana orang-orang tersebut berada di bawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. Organisasi juga merupakan perserikatan manusia yang didalamnya terdapat aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah

organisasi akan cepat mencapai tujuannya dengan cepat dan mudah apabila terdapat manajemen yang baik dalam organisasi tersebut. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan:2005). Manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Pengelolaan manajemen tidak hanya dilakukan pada suatu organisasi atau perusahaan saja, tapi pengelolaan manajemen juga dilakukan pada Pura-Pura besar yang ada di Bali salah satu contohnya pada Pura Jagatnatha di Kabupaten Buleleng. Pengelolaan yang dimaksud disini adalah pengelolaan hak dan kewajiban para rohaniawan umat Hindu. Pelaksanaan ibadah agama Hindu yang lebih banyak berupa upacara *Yadnya* yang dilakukan sebagai persembahkan untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penciptaan alam semesta dan isinya yang dinikmati oleh manusia. Dalam ritual-ritual keagamaan tersebut sangat membutuhkan rohaniawan untuk membantu pelaksanaan ritual. Dalam Agama Hindu rohaniawan yang secara langsung mengantarkan suatu upacara keagamaan dikenal dengan berbagai nama jika dilihat dari tingkat penyuciannya. Rohaniawan yang tergolong upacara *Dwijati* disebut dengan *Pandita* dan rohaniawan yang tergolong upacara *Ekajati* disebut dengan *Pemangku*. *Pemangku* digolongkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan mulia di dalam masyarakat Hindu. Tugas dan kewajiban seseorang menjadi panutan atau contoh umat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, *Pemangku* wajib pula menjaga kesucian dirinya sendiri mengingat *Pemangku* adalah manusia biasa pada umumnya yang diberikan tugas dibidang keagamaan dan menjaga kesucian pura.

Seorang *Pemangku* yang berkewajiban melayani masyarakat sebagai perantara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa seperti pelayanan *Pemangku* yang ada pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng. Pada dasarnya pemilihan (*rekrutment*) atau penentuan seorang *Pemangku* biasa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu yang pertama dengan cara *Nyanjan* dan yang kedua dengan memilih garis keturunan. Cara *Nyanjan* merupakan prosesi pemilihan *Pemangku* dengan prosesi untuk memohon kepada *Ista Dewata* atau *Ida Bhatara/Bhatari* agar berkenan memberikan petunjuk dan ijin dalam prosesi pemilihan secara secara niskala. Sedangkan pemilihan *Pemangku* melalui garis keturunan yaitu dengan cara memilih anak lelaki tertua atau salah satu anak lelaki dari keluarga *Pemangku* tersebut. Lain halnya dengan pemilihan *Pemangku* pertama yang bertugas di Pura Agung Jagatnatha Buleleng dimana *Pemangku* tersebut ditunjuk secara formal karena dipandang cakap dan memenuhi kriteria sebagai seorang *Pemangku* sehingga diturunkannya Surat Keputusan dari Bupati Buleleng setelah diresmikannya Pura Agung Jagatnatha Buleleng.

Di Pura Agung Jagatnatha Buleleng terdapat 2 (dua) status *Pemangku* yaitu *Pemangku Utama/Tetap* dan *Pemangku Penggromba/Pengayah*. Yang disebut *Pemangku Utama/Tetap* yaitu *Pemangku Gede* dan *Pemangku Alitan*. Sedangkan *Pemangku Penggromba/Pengayah* merupakan *Pemangku* yang bersedia "*ngaturang ayah*" yang berasal dari *Pemangku Sanggah*, *Pemangku Desa* ataupun *Pemangku Tapakan*. *Pemangku Utama/Tetap* bertugas *muputang karya* secara kontinyu dalam artian bertugas berkelanjutan dan terus menerus sampai beliau meninggal dan keturunannya berhak untuk melanjutkan sebagai *Pemangku*. Sedangkan *Pemangku Penggromba/Pengayah* sifatnya *ngaturang ayah* membantu *Pemangku Utama*. Antara *Pemangku Utamadengan Pemangku Penggromba/Pengayah* diberikan hak berupa sesari yang berbeda menurut statusnya. *Pemangku Utama/Tetap* yang bertugas wajib di Pura mendapat haknya sesuai aturan yang berlaku dalam anggaran dasar Pura sedangkan *Pemangku Penggromba/Pengayah* tetap *ngayah* walaupun tidak dibayar secara pasti. Berdasarkan sumber data dari pengurus sekretariat Pura Agung Jagatnatha Buleleng jumlah *Pemangku Utama/Tetap* sebanyak 3 orang (*lanang istri*) sedangkan jumlah *Pemangku Panggromba/Pengayah* yaitu sebanyak 63 orang. Adanya fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam terhadap sistem manajemen *Pemangku* yang dilakukan pada Pura Agung Jagatnatha di

Kabupaten Buleleng. Bagaimana merencanakan tenaga kerja termasuk didalamnya sistem pemilihan (*recruitment*), pengorganisasian penetapan pembagian kerja, pengarahan tenaga kerja dan juga pengendalian terhadap tenaga kerja mengenai aturan yang berlaku. Pembagian hak dan kewajiban *Pemangku* juga sangatlah riskan dalam memicu konflik. Tugas dan kewajiban *Pemangku* sangatlah berat karena ada tanggung jawab niskala didalamnya. *Pemangku* yang memang benar-benar ngayah mengabdikan diri sebagai perantara umat dengan Sang Hyang Widhi Wasa tidak mempersoalkan haknya malah sebaliknya dengan *Pemangku* yang *demen kaden* yang seringkali ribut mengenai pembagian haknya yang mengakibatkan timbulnya konflik diantara sesama *Pemangku*. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji secara lebih mendalam tentang manajemen *Pemangku* yang ada pada Pura Agung Jagatnatha di Buleleng. Dari latar belakang diatas dirumuskan beberapa masalah yang terjadi dilapangan yakni: a. Apa motivasi seseorang bersedia mengabdikan dirinya sebagai *Pemangku* pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng Bali?. b. Bagaimana sistem manajemen *Pemangku* pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng Bali?. c. Bagaimanakah status/peran *Pemangku* dalam manajemen ritual yang diterapkan Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng Bali?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang menyajikan data secara deskriptif. Tahapan penelitian dimulai dari, tahap pengumpulan data, yang dilakukan dengan pengumpulan data baik data primer berupa hasil observasi dilapangan, dan data sekunder berupa informasi tertulis lain mengenai manajemen *pemangku*. Tahap pengolahan data, pada tahapan ini dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi sesuai dengan fokus penelitian yang dianalisis dengan merujuk pada prinsip metode penelitian tata cara pemilihan *pemangku* dan secara implisit dari segi *ayah-ayahan* yang diinterpretasikan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Tahap akhir dalam penelitian ini yang dilakukan dengan penyusunan intisari hasil penelitian mengenai Manajemen *Pemangku* pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Maknawi Menjadi Pemangku Pada Pura Agung Jagatnatha Di Kabupaten Buleleng Bali

a. Alasan Penunjukan

Pemilihan pemangku secara penunjukan sering kali dipilih dalam konteks tertentu, terutama di dalam organisasi atau sistem pemerintahan yang membutuhkan kecepatan, stabilitas, atau pengendalian tertentu dalam penunjukan seseorang pada posisi strategis. Secara umum, penunjukan sering kali dipilih dalam situasi yang membutuhkan efisiensi, keahlian khusus, atau kestabilan politik, meskipun dalam banyak konteks demokratis, pemilihan lebih dipilih untuk memastikan representasi yang lebih luas dan partisipatif dari masyarakat atau anggota organisasi. Dalam wawancara yang Peneliti lakukan kepada Jero Mangku Gede Suyasa (78 tahun) menyatakan bahwa :

“.....awalnya saya ditunjuk menjadi koordinator Pemangku di Pura Agung Jagatnatha Buleleng karena pada saat itu saya ikut dalam panitia ngenteg linggih. Mereka semua tau kalau saya sudah pernah melakukan pawintenan di sanggah saya di Klungkung sebagai pengayah paman saya yang saat itu jadi Pemangku di sanggah. Saya terkejut dengan ditunjuknya saya dalam Surat Keputusan Bupati bahwa saya menjadi koordinator pemangku. Pada saat itu saya masih aktif menjadi Dosen Sejarah di STKIP yang saat ini menjadi Undiksha. Ada pro dan kontra waktu itu karena pemilihan pemangku tidak secara Nyanjan melainkan secara penunjukan. Karena sudah ditetapkannya Surat Keputusan dan niat saya tulus untuk ngayah saya jalani dengan ikhlas yang seiring berjalannya waktu saya merasa ada ikatan niskala dari Ida Bhatara yang melinggih di Pura Agung Jagatnatha Buleleng. Ini terlihat dari beberapa kejadian kerawuhan pada saat nunas tirta ke seluruh Pura di Bali bahwa yang boleh menyambut ketikaumat mendak tirta hanya saya. Begitu juga pada kejadian pasupati keris dari Grya ada sutri yang kerawuhan bahwa harus saya yang

menyambut kedatangan keris itu dengan ritual dan banten....” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2024)

Hasil wawancara diatas didukung oleh pernyataan Schein, E. H. (2010) bahwa ada beberapa alasan utama mengapa Pemangku dipilih melalui penunjukan seperti yang dinyatakan Schein, E. H. (2010) :

1. Kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil dan konsisten dalam situasi di mana diperlukan kepemimpinan yang stabil atau konsistensi dalam kebijakan, penunjukan dapat memberikan kepastian lebih cepat tanpa harus menunggu proses pemilihan yang bisa memakan waktu lama. Misalnya, dalam pemerintahan, dalam keadaan darurat atau peralihan kekuasaan, penunjukan bisa menjadi cara yang lebih cepat untuk mengisi posisi kunci.
2. Pencegahan konflik atau ketidakpastian, jika proses pemilihan terbuka berisiko menimbulkan ketegangan atau konflik yang berlarut-larut, penunjukan sering dianggap lebih efektif. Misalnya, dalam situasi yang sensitif di negara atau organisasi besar, penunjukan bisa menjadi jalan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih dapat menjaga stabilitas tanpa menambah polarisasi.
3. Efisiensi proses penunjukan lebih efisien daripada pemilihan yang memerlukan waktu panjang, kampanye, dan proses seleksi yang sering kali rumit. Dengan penunjukan, pemangku jabatan bisa langsung menjalankan tugasnya tanpa melalui prosedur pemilihan yang memakan waktu.
4. Kualifikasi dan kemampuan spesifik, penunjukan memungkinkan pihak yang berwenang untuk memilih individu yang memiliki kualifikasi, kemampuan, atau pengalaman yang paling sesuai untuk posisi tersebut. Ini sering digunakan dalam kasus di mana jabatan membutuhkan keahlian khusus yang mungkin tidak dapat ditemukan melalui proses pemilihan terbuka.
5. Keputusan berdasarkan kepercayaan dalam banyak kasus, penunjukan adalah cara untuk memastikan bahwa pemangku jabatan dipilih oleh pihak yang memiliki wewenang dan kepercayaan untuk membuat keputusan tersebut. Misalnya, seorang presiden atau pejabat pemerintah mungkin lebih memilih untuk menunjuk seorang penasihat atau pejabat tertentu yang mereka percayai dan yakin dapat bekerja sesuai visi mereka.
6. Sistem Pemerintahan atau Struktur Organisasi di beberapa negara atau organisasi, sistem pemerintahan atau struktur organisasi memang dirancang untuk mengutamakan penunjukan atas pemilihan, misalnya dalam sistem monarki, pemerintahan otoriter, atau dalam beberapa organisasi yang berbasis pada meritokrasi.

b. Alasan Kelanjutan Profesi

Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng kebanyakan bahkan semua Pemangku baik Pemangku Tetap maupun Pemangku Panggromba merupakan orang suci yang sebelumnya sudah menjadi Pemangku Sanggah, Pemangku Tapakan, Sutri maupun Premas. Mereka dianggap orang-orang suci serta mempunyai dasar-dasar tentang kepemangkuan. Dasar-dasar kepemangkuan adalah panduan yang membantu seorang pemangku menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, keahlian, dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang ada. Kepemangkuan tidak hanya soal melanjutkan profesi atau jabatan, tetapi juga menjaga kelangsungan dan perkembangan institusi, budaya, atau tradisi yang dipegangnya. Seorang pemangku biasanya memegang peran penting dalam meneruskan atau menjalankan suatu tanggung jawab tertentu, baik dalam konteks adat, pemerintahan, organisasi, maupun profesi lainnya. Kepemangkuan itu sendiri sering kali memiliki dasar-dasar atau prinsip yang menjadi panduan bagi pemangku dalam menjalankan tugasnya dengan efektif dan bertanggung jawab.

Alasan seseorang menjadi Pemangku sebagai kelanjutan profesi seperti yang dijelaskan oleh Jro Mangku Astika (74 tahun) selaku Jro Mangku Alitan di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng dalam wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

“.....saya sudah menjadi Pemangku di Pura Khayangan Alit Desa Penarukan sejak tamat SMA. Karena diketahui sebagai Pemangku oleh rekan kerja dan atasan di tempat saya bekerja yaitu di Kantor Bupati, dimanapun saya ditempatkan selalu diberi tanggung jawab muput upacara keagamaan dikantor seperti Rainan Purnama, Rainan Tilem, Piodalan dan

rerahinan lainnya. Saya juga sempat ditugaskan muput upacara yadnya di Rumah Jabatan Bupati. Bertepatan dengan adanya pembangunan Pura Agung Jagatnatha pada saat itu saya juga ikut ngayah dari upacara ngeruak sampai upacara Ngenteg Linggih karena beberapa instansi pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan tempekan Pura. Setelah upacara Ngenteg Linggih disitulah saya disuruh oleh Bapak Bupati Buleleng kala itu Bapak Ginantra memberi saya amanat untuk ngiring di Pura. Karena perintah atasan saya tidak bisa berbuat apa dan mengiyakan perintah tersebut. Dari penunjukan itulah saya menjadi Pemangku di Pura dengan status Pemangku Alitan membantu Jero Mangku Gede dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng seperti Jero Mangku Gede Suyasa." (Wawancara tanggal 13 Nopember 2024).

Wawancara yang peneliti lakukan kepada Jero Mangku Astika dapat dijelaskan bahwa sebelum ditunjuk sebagai Pemangku di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng Beliau memang sudah menjadi seorang Pemangku di desanya tepatnya di Pura Khayangan Alit Desa Penarukan sejak lulus dari SMA. Awal mula Beliau menjadi Pemangku karena memang dari keturunan yang terdahulu memang ada menjadi Seorang Pemangku tetapi dalam waktu yang lama tidak ada meneruskan. Dari Beliau kecil semasih SD suka ke Pura karena ada keluarga yang ngayah ke Pura dan selalu merasa nyaman jika ada di Pura.

c. Alasan Religius Magis

Menjadi seorang pemangku dengan alasan religius-magis bermakna seseorang dipilih untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepercayaan spiritual, ritual keagamaan, serta kekuatan gaib atau magis dalam suatu tradisi atau agama. Alasan seseorang menjadi pemangku dalam konteks ini sering kali dilandaskan pada keyakinan bahwa mereka memiliki bakat dalam menyampaikan wahyu, menjalankan ritual atau penyembuhan, maupun menjalin hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pemangku ini tak hanya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin spiritual, namun juga diakui oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki kekuatan magis atau spiritual.

Situasi religius magis diatas sama seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu Pemangku Panggromba pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng yang bernama Jero Gede Sudana (67 tahun) yang mengatakan bahwa :

".....ada pawisik yang menyuruh saya untuk ngayah disini, tidak sekali duakali tapi sering. Disaat saya melakukan pengobatan kepada pasien pasti ada *pawisik* yang menyuruh saya *ngaturang ayah* ke Pura Jagatnatha. Saya dan istri melapor kepada prajuru pura dan dibolehkan untuk ngayah sebagai mangku panggomba. Sudah hampir 20 tahun saya ngayah disini dan sekarang mendapat tugas ngayah di Patung Ganesha seminggu sekali setiap hari Kamis sore....." (Wawancara tanggal 17 Oktober 2024).

Penjelasan hasil wawancara diatas bahwa sebelum bergabung sebagai Pemangku di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng Jero Gede Sudana dan istrinya merupakan seorang yang *ngiring* menjadi Jero Tapakan. Disebut *Ngiring* (mengikuti). karena dia hanya melakukan apa yang diinginkan Sesuhunan (Dewa/Bhatara). Saat Bhatara menari (Bhatara pikayunan masolah) di Pura, beberapa orang hanya mengikuti sebagai wadah.

d. Alasan Kesembuhan Penyakit

Kesembuhan penyakit yang dialami oleh Pemangku di Pura Jagatnatha Buleleng diyakini tidak semata-mata berasal dari aspek medis atau fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari kekuatan spiritual dan keharmonisan niskala yang terbangun melalui proses keyakinan, yadnya, dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Sebagai sosok suci yang memiliki tanggung jawab spiritual dalam pelaksanaan upacara di pura, sang pemangku telah menjalani tapa, brata, dan upawasa secara tulus ikhlas. Dalam proses penyembuhan, berbagai unsur dipercaya turut berperan:

a) Kekuatan Doa dan Bhakti

Doa yang dipanjatkan dengan ketulusan oleh pemangku dan krama (umat) diyakini membangun vibrasi positif yang memperkuat energi penyembuhan dari dalam diri maupun semesta.

b) Restu dan Anugerah Ida Sang Hyang Widhi

Banyak pihak meyakini bahwa kesembuhan tersebut merupakan bentuk anugerah atau "waranugraha" dari Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai Dewa Siwa atau Dewa Wisnu

- yang dipuja di pura tersebut.
- c) Kesucian dan Energi Sakral Pura Jagatnatha
Pura Jagatnatha sebagai tempat pemujaan utama kepada Sang Hyang Widhi diyakini memiliki kekuatan taksu dan energi spiritual tinggi. Melakukan pemujaan dan penyucian diri di tempat ini dipercaya mempercepat pemulihan secara spiritual dan fisik.
 - d) Keseimbangan Sekala-Niskala
Upaya penyembuhan tidak hanya dilakukan secara lahiriah (sekala) melalui pengobatan, tetapi juga secara batiniah (niskala) melalui ritual pembersihan (melukat), persembahyangan, dan mohon petunjuk secara spiritual.

e. Alasan Imbalan Sosial

Dalam wawancara penulis dengan Jero Mangku Astika bahwa setelah dirinya menjadi seorang Pemangku Beliau merasa mendapat penghargaan karena label Pemangku yang melekat pada dirinya mengubah tata etika masyarakat jauh berbeda kepada dirinya. Dari pemanggilan nama dengan sebutan "Jero Mangku" sudah memperlihatkan bahwa Beliau sangat dihormati oleh masyarakat. Cara berpakaian menjadi seorang Pemangku pun berbeda dari masyarakat umumnya yang mencirikan bahwa dirinya merupakan orang suci. Penghargaan sosial lainnya dapat dilihat dari Beliau yang menjadi seorang Pemangku kerap diajak Metirta Yatra dan juga mendapat undangan sebagai peserta pelatihan yang berhubungan dengan kepemangkuan. Menjadi pemangku Hindu dengan alasan imbalan sosial berarti seseorang yang memegang peran atau jabatan dalam konteks keagamaan atau spiritual Hindu dengan harapan mendapatkan imbalan dalam bentuk status sosial, penghormatan, atau pengakuan masyarakat. Orang-orang yang dianggap sebagai pemangku dalam Agama Hindu dianggap melakukan tugas-tugas keagamaan, seperti memimpin upacara, memberikan bimbingan spiritual, atau mengelola kegiatan keagamaan. Mereka dapat berupa kelian, pendeta (misalnya, pendeta atau pandita), atau orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ritual dan kebiasaan Hindu.

f. Alasan Imbalan Finansial

Pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng imbalan finansial Pemangku sesuai dengan status dan kedudukannya serta sesuai dengan hak dan kewajibannya. Imbalan finansial bagi Pemangku ada dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Imbalan secara langsung berupa uang yaitu imbalan setelah melakukan ritual upacara yang dalam Agama Hindu disebut dengan *sesari* yang didapat Pemangku setelah melakukan kewajibannya melaksanakan upacara yadnya. Sedangkan imbalan tidak langsung merupakan imbalan yang tidak berupa uang secara langsung, misalnya mendapat seperangkat pakaian Pemangku yang biasanya dibagikan setahun sekali. Selain itu karena mendapat gelar seorang Pemangku maka dapat melayani masyarakat dalam kebutuhan *banten*. Selain bertugas untuk melaksanakan upacara Pemangku juga dapat menjual banten yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam era modern seperti ini jasa pembuatan banten sangat diperlukan dan sangat membantu masyarakat yang tidak bisa membuat banten ataupun bagi masyarakat sibuk bekerja.

Imbalan nonfinansial bagi para Pemangku di Pura Agung Jagatnatha juga diberikan seperti imbalan sosial yang sudah disebutkan diatas. Pekerjaan yang sesuai, pemberian jabatan sebagai simbol status, lingkungan kerja yang kondusif, dan sarana prasarana yang layak untuk mendukung pelaksanaan kewajiban. Selain itu peluang pengembangan karir berupa kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar ataupun pendidikan lanjutan juga merupakan suatu imbalan bagi Pemangku untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dan juga mengembangkan wawasannya dalam bidang kepemangkuan.

2. Sistem Manajemen Pemangku Di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng

Untuk mengetahui sistem manajemen yang dilakukan pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng berikut dijelaskan sesuai dengan fungsi manajemen menurut GR.Terry (1958) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* yaitu :

a. Proses Perencanaan (Planning)

Dalam proses perencanaan di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng, pemilihan Pemangku dilakukan dengan cara yang berbeda dari kebiasaan umum seperti melalui proses

nyanjan. Di pura ini, Pemangku ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng. Tradisi nyanjan tidak digunakan karena pihak prajuru menilai bahwa Pura Agung Jagatnatha merupakan pura modern, sehingga diperlukan sosok Pemangku yang juga berkarakter modern, terdidik, dan telah memiliki bekal pengetahuan kepemangkuhan melalui berbagai pelatihan yang relevan. Hal ini dipertimbangkan karena struktur kepengurusan (prajuru) pura berasal dari tempekan atau instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Buleleng. Dalam struktur tersebut, Bupati Buleleng bertindak sebagai penanggung jawab utama pengelolaan pura, sementara Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi ketua, dibantu oleh jajaran dari berbagai instansi pemerintahan di kabupaten tersebut. Dengan struktur seperti ini, kunjungan dari pejabat dan staf instansi pemerintah untuk sembahyang di pura menjadi hal yang rutin. Oleh karena itu, prajuru menilai pentingnya sosok Pemangku yang modern, terdidik, dan berwawasan luas, yang tidak hanya melayani kebutuhan umat dalam sembahyang, tetapi juga mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dari kalangan birokrasi dan pemerintahan. Pada Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha Tahun 2003 menyebutkan tata cara pemilihan pemangku sebagai berikut:

Palet 5

Pawos 18

1. Ring Pura Agung Jagatnatha patut kepastikayang sane kanggeh dados pamucuk Pemangku, tur kemanggehang pinaka Pemangku Gede nganutin tata cara ngadegang Pemangku;
2. Pemangku Gede Kabih olih Pemangku Alitan;
3. Tata cara ngadegang Pemangku Gede lan Pemangku Alitan inggih punika:
 - a. Kajudi ring sejeroning paruman Prajuru;
 - b. Kaambil/mawit saking wargi sane sampun ngranjing madesa Pakraman ring Kabupaten Buleleng tur malih ring Kota Singaraja;
4. Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan lanang istri patut mapawintenan ring Pura Agung Jagatnatha sane kapuput olih sang sulinggih saha kesaksinin olih Prajuru miwah Kelihan Tempekan;
5. Pemangku Alitan akehnyane limang diri.

Pawos 23

1. Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan kagentosin prade seda, kageringan dahat, malaksana nilar sesana, sangkaning pinunas ngeraga, kesah saking Kabupaten.
2. Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan keadegang manut Pawos 18 Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha.

Penjelasan Pawos 18

1. Pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng sudah dipastikan yang menjadi Pemangku Utama dan dijadikan sebagai Pemangku Gede sesuai dengan tata cara pemilihan Pemangku.
2. Pemangku Gede dibantu oleh Pemangku Alitan
3. Tata cara pemilihan Pemangku Gede dan Pemangku Alitan:
 - a. Dipilih pada saat Rapat Prajuru
 - b. Diambil dari warga yang sudah masuk menjadi anggota desa pakraman di Kabupaten Buleleng dan juga di Kota Singaraja
4. Pemangku Gede dan Pemangku Alitan harus diberihkan di Pura Agung Jagatnatha yang dipimpin oleh seorang sulinggih dan disaksikan oleh Prajuru dan Ketua Tempekan
5. Pemangku Alitan banyaknya 6 orang

Penjelasan Pawos 23

1. Pemangku Gede dan emangk Alitan diganti psda saat ketika meninggal sakit keras, melakukan perbuatan tidak terpuji, karena keinginan sendiri, keluar dari Kabupaten.
2. Pemangku Gede dan Pemangku Alitan dipilih berdasarkan Pawos 18 Awig-Awig Pua Agung Jagatnatha.

b. Proses Pengorganisasian

Dalam proses pengorganisasian dilakukan kegiatan pengelompokan orang-orang yang ada di dalamnya agar dapat digerakkan sesuai aturan dalam rencana mencapai tujuan. Pada Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng Tahun 2003 juga terdapat pengelompokan Pemangku sebagai berikut:

Palet 5

Pawos 17

Kawenten Pemangku ring Pura Agung Jagatnatha maka luiripun:

1. Pemangku Gede
2. Pemangku Alitan

Pawos 19

1. Lianan Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan, wenten kebawos Pemangku Pengayah, inggih punika pemangku sane dredha bhakti ngaturang ayah ngewentonin Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan ring saluiring upacara.
2. Pemangku Pengayah patut matur piuning ring Pemangku Gede sadurung lumaksana.

Terjemahan:

Palet 5

Pawos 17

Pemangku yang ada di Pura Agung Jagatnatha diantaranya:

1. Pemangku Gede
2. Pemangku Alitan

Pawos 19

1. Selain Pemangku Gede miwah Pemangku Alitan, ada disebut Pemangku Pengayah yaitu Pemangku yang iklas *ngaturang ayah* membantu Pemangku Gede dan Pemangku Alitan pada setiap upacara keagamaan
2. Pemangku Pengayah harus melapor kepada Pemangku Gede sebelum melakukan sesuatu

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa di Pura Agung Jagatnatha ada 2 (dua) Pemangku yaitu Pemangku Gede dan Pemangku Alitan Kedua status Pemangku ini tergolong Pemangku Tetap. Pemangku Gede merupakan Pemangku Utama yang memimpin pelaksanaan setiap upacara yadnya di Pura Agung Jagatnatha. Dalam memimpin upacara ini Pemangku Gede dibantu oleh Pemangku Alitan. Jika Pemangku Gede tidak bisa melaksanakan tugasnya karena suatu halangan maka yang mengganti untuk memimpin upacara yadnya adalah Pemangku Alitan.

c. Proses Pengarahan/Actuating

Setelah adanya pengelompokan dan pembagian tugas, hal yang sangat penting diperhatikan bagi seorang pemimpin adalah melakukan pengarahan dan kontrol pada sumber dayanya. Mengarahkan agar dalam melakukan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawabnya. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. I Nyoman Rasa Olan, M.Ag selaku Sekretaris I Prajuru Pura Agung Jagatnatha Buleleng menyatakan:

“.....kami mengadakan rapat paripurna setahun sekali dipimpin oleh Bapak Setda Kabupaten Buleleng atau Sekretaris I Prajuru Pura. Dalam rapat kami membahas persiapan piodalan mulai dari perencanaan kegiatan, susunan acara, banten dan lain sebagainya. Membahas pergantian pengurus jika sudah masa jabatan habis dan juga mengingatkan tugas pokok sebagai Prajuru. Setelah piodalan kita mengadakan rapat kembali melaporkan pelaksanaan ritual dan juga pembahasan LPJ dan LPJ tersebut kita tembuskan kepada tempekan karena dana piodalan juga berasal dari sumbangan tempekan. Selain Rapat Paripurna juga ada rapat Pemangku yang dipimpin oleh Jero Mangku Gede bersama anggota Paguyuban Pemangku Sunariloka. Rapat Pemangku diagendakan kapan saja sesuai keinginan dan juga sesuai masalah yang akan dibahas. Rapat Pemangku dilaksanakan untuk memantau keadaan pura dan keadaan pemangku. Memotivasi Pemangku dan selalu mengingatkan swadharmanya. Menanyakan apakah ada kendala yang mereka alami selama *ngayah*. Apakah Pemangku Pengayah yang melaksanakan piket di pelinggih Ganapati berjalan dengan lancar. Jika ada masalah yang sangat urgent ataupun

ada isu terkait Pura kita segera agendakan rapat dan mencari solusi dari masalah tersebut.” (Wawancara tanggal 4 Nopember 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris I Prajuru Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng dapat dijelaskan bahwa Proses Pengarahan Pemangku pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng biasanya dilakukan dalam rapat. Ada 3 jenis rapat yang terdapat di Pura yaitu : Rapat Paripurna, Rapat Prajuru, Rapat Pemangku seperti yang tertulis pada Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng.

d. Proses Pengendalian/Controlling

Sistem pengawasan tidak saja dilakukan pada lingkungan perusahaan tetapi juga dilaksanakan pada sebuah pura khususnya di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng. Mengingat pura ini disebut pura modern milik pemerintah daerah kabupaten Buleleng maka sudah seharusnya diadakan pengawasan terhadap keadaan pura dan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut penuturan Sekretaris I Prajuru Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng bahwa pengawasan yang dilakukan agar pura tetap dalam keadaan aman, tidak sembarangan orang yang bisa keluar masuk pura. Begitu juga dengan peran Pemangku pengayah yang setiap hari harus ada yang ngayah di Palinggih Ganapati sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada AD/ART Paguyuban Pemangku Sunariloka Pasal 6 dan Pasal 10 diatur mengenai kewajiban, sanksi dan hak terhadap Pemangku jika ditemukan melakukan pelanggaran seperti bunyi pasal dibawah ini :

Pasal 6

Khusus untuk anggota Pemangku Pangromba tetap yang bertugas ngaturang ayah di Palinggih Ganapati wajib:

- a. Ngaturang ayah ke jeroan setiap hari suci keagamaan kecuali sedang bertugas di palinggih Ganapati
- b. Jika tidak melaksanakan kewajiban ngayah seperti sub a diatas akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari tugas ngayah di palinggih Ida Bhatara Ganapati.

Pasal 10

Kehilangan atau diberhentikan dari keanggotaan

Kehilangan atau diberhentikan sebagai anggota tetap maupun anggota tidak tetap Pemangku Pangromba paguyuban Pemangku Sunariloka Pura Agung Jagatnatha apabila:

1. Sakit keras sehingga tidak bisa ngaturang ayah
2. Atas kehendak sendiri
3. Diberhentikan oleh pengurus diperkuat oleh Jro Mangku Gede dan Jro Mangku Alitan serta kelian prajuru Pura Agung Jagatnatha karena melanggar :
 - a. Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha Buleleng
 - b. AD dan ART Paguyuban Pemangku Sunariloka Pura Agung Jagatnatha Buleleng
 - c. Sasana Kepemangku
4. Jika ada anggota tetap Pemangku Pangromba tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam ayat 3 diatas dikenakan sanksi peringatan lisan sebanyak tiga kali, dan jika masih tidak mematuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan paguyuban dan tidak dibolehkan *ngaturang ayah* di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng.

Awig-Awig dan AD/ART dibuat oleh Prajuru Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng sebagai sistem pengendalian/kontrol terhadap sumber daya yang ada di lingkungan pura. Tujuan adanya sistem pengendalian ini agar mampu mengontrol dan mengawasi juga sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan jika terjadi yang tidak sesuai dengan rencana awal. Melakukan evaluasi dan mengukur ketercapaian target pelayanan terhadap masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan persembahyangan dan juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan ajaran agama, dan menjaga integritas serta kehormatan Agama Hindu.

3. Status/Peran Pemangku Dalam Manajemen Ritual Yang Diterapkan Pada Pura Agung Jagatnatha Di Kabupaten Buleleng

a. Status Pemangku dalam Penyelenggaraan ritual

Pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng membagi status Pemangku Tetap menjadi 2 (dua) yaitu Pemangku Gede dan Pemangku Alitan. Dari status Pemangku tersebut membedakan tugas dari masing-masing Pemangku. Pemangku Gede yang berstatus sebagai pemangku utama mempunyai tanggung jawab utama dalam memimpin setiap pelaksanaan upacara di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng. Pemangku Alitan yang statusnya dibawah Pemangku Gede bersifat membantu sebagaimana diatur dalam Awig-Awig Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng. Status Pemangku Gede kedudukannya sangat penting dalam penyelenggaraan ritual. Pemangku Gede yang merupakan Pemangku Utama mempunyai wewenang utuh untuk memimpin setiap ritual yang ada pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng. Ketika Pemangku Gede berhalangan, maka tugas Pemangku Gede memimpin ritual dilimpahkan kepada Pemangku Alitan. Setelah mendapat amanat dari Pemangku Gede barulah Pemangku Alitan melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam pelaksanaan ritual.

Selain Pemangku Tetap (Pemangku Gede dan Pemangku Alitan) pada Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng juga terdapat Pemangku Pangayah/Pangromba. Pemangku Pangromba/Pengayah dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu Pemangku Pangromba Tetap dan Pemangku Pangromba Tidak Tetap. Berdasarkan sumber data dari pengurus sekretariat Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng jumlah Pemangku Pangromba/Pengayah Tetap yaitu sebanyak 63 orang. Pemangku Pangromba/Pengayah ini terdiri dari Pemangku, Sutri, dan Permas yang tetap *ngaturang ayah* setiap hari suci Agama Hindu dan selama berlangsungnya upacara Odalan Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng. Pemangku Tetap dengan Pemangku Pangromba sangat saling ketergantungan dalam pelaksanaan ritual. Pemangku Gede membutuhkan Pemangku Pengayah untuk membantu kelancaran upacara begitu juga Pemangku Pengayah tanpa adanya Pemangku Gede pelaksanaan ritual tidak akan terlaksana. Kerjasama melibatkan pembagian tugas sesuai statusnya masing-masing secara keseluruhan membutuhkan kerjasama tim yang baik, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan untuk bekerja dengan cepat dan efisien.

b. Peran Pemangku Tetap dan Pemangku Pangromba dalam penyelenggaraan ritual

Pura Agung Jagatnatha sebagai Parahyangan Jagat Buleleng sudah sepatutnya kegiatan-kegiatan ritual yang dilaksanakan sesuai dengan statusnya sebagai Parahyangan Jagat sebagaimana yang disandangnya yakni Pura Agung. Sebagai pura sungsgungan jagat disamping melaksanakan upacara-upacara yang ada hubungannya dengan keberadaannya juga sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada umat pada umumnya yang ada hubungannya dengan usaha peningkatan *sradha* dan *bhakti* umat kepada Ida Sang Hyang Widhi. Selain itu juga memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan seni budaya. Dalam hari raya keagamaan ini yang melaksanakan upacara bukan seorang Pandita tapi hanya cukup dilaksanakan oleh Pemangku Tetap yang dibantu Pemangku Pangromba dengan tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan sebelum ritual

Pemangku Pangromba memulai tugasnya memastikan keadaan pura sudah dalam keadaan bersih, menyiapkan sarana upacara seperti bunga, dupa, air untuk tirta dan segala bahan yang diperlukan. Meletakkan banten sesuai dengan pellingih yang diarahkan Pemangku Gede.

b) Memulai ritual

Pemangku Gede terlebih dahulu melakukan pebersihan pura dengan banten sebagai sarana penyuciannya. Setelah itu Pemangku Gede akan mulai *nganteb* dengan doa pembukaan untuk mengundang kehadiran dewa-dewi serta memohon keselamatan dan kelancaran pelaksanaan upacara.

c) Puja dan Pembacaan Mantra

Pemangku Gede memimpin doa dengan melantunkan mantra-mantra suci dan membunyikan gentanya memohon keberkahan dan perlindungan dari para dewa. Biasanya Pemangku Gede memimpin doa dalam bahasa Sansekerta atau Bali Kuno. Mantra-mantra yang dilantunkan bertujuan untuk mengundang energi positif dan menjaga keseimbangan

alam semesta. Pemangku Pengromba bertugas *ngayaban banten* ketika Pemangku Gede melantunkan doa persembahkan kepada para dewa. Setelah Pemangku Gede selesai membacakan doanya dan selesai menghaturkan persembahkan dilanjutkan dengan sembahyang bersama dimulai dengan Puja Trisandya dan Panca Kramaning Sembah yang diarahkan oleh Pemangku Pangromba.

d) Memberikan berkah

Selesai persembahyangan Pemangku Pangromba akan memberikan berkah kepada umat yang hadir berupa air suci (tirtha) dan biji. Berkah ini bertujuan untuk menyucikan umat agar selalu diberim keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian.

e) Penutup Upacara

Pemangku Gede mengucapkan doa penutup menghaturkan terimakasih atas anugerah para dewa. Pada saat penutupan upacara Pemangku Pangromba biasanya memberikan nasihat spiritual kepada umatnya agar selalu menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng juga melayani masyarakat yang melakukan ritual kadangkala seperti contohnya:

1. Matur Piuning

Kegiatan matur piuning kebanyakan dilakukan oleh krama tempekan di Kota Singaraja yang akan melaksanakan upacara Dewa Yadnya, Manusa Yadnya ;dan Pitra Yadnya yang bersifat insidental misalnya persembahyangan yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan, Panitia Studi Tour, Rombongan kontingen kabupaten yang mengikuti event dan lain sebagainya.

2. Upacara Naur Sesangi dan pegat sot

Upacara ini dilakukan secara individual biasanya dilaksanakan sebagai cerminan menepati janji kepada Dewa ketika keinginan seseorang tercapai. Pelaksanaan upacara ini dilaksanakan pada saat piodalan di Pura Agung Jagatnatha Kabupaten Buleleng

3. Upacara Mejaya-jaya

Pada umumnya dilakukan dalam kaitan pembentukan pengurus organisasi maupun kepanitiaan kegiatan. Upacara pertama yang dilakukan adalah mebyakala dijaba tengah dilanjutkan upacara kedua mejaya-jaya dan persembahyangan di jeroan pura.

4. Upacara Papintonan

Upacara ini dilakukan ketika umat yang anaknya pertama kali diajak ke pura setelah upacara tigabulanan dan dilakukan pada saat piodalan ataupun rerahinan.

5. Upacara Melukat

Upacara Meulukat dilakukan umat secara individual. Umat membawa banten melukat sesuai dengan petunjuk pewacakan dan juga berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Melukat dilakukan di jabaan Pura Taman Beji didahului dengan maturpiuning di Jeroan dan setelah melukat dilanjutkan dengan sembahyang di Jeroan.

6. Tirta Yatra dan Meajar-ajar

Pura Agung Jagatnatha melayani umat yang melakukan Tirtha Yatra ke Pura dan upacara meajar-ajar (rangkai upacara setelah ngaben).

KESIMPULAN

Manajemen Pemangku pada Pura Agung Jagatnatha di Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang unik dan relevan dengan konteks kekinian. Terkait motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai Pemangku, dorongan utamanya berasal dari rasa bhakti, tanggung jawab spiritual, dan kesadaran akan pentingnya peran Pemangku dalam menjaga kesucian dan kelangsungan ritual keagamaan. Selain itu, adanya legitimasi formal melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng menjadi faktor penguat yang menegaskan pengabdian Pemangku tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga diakui secara kelembagaan. Dalam hal sistem manajemen Pemangku, pendekatan yang digunakan bersifat modern dan terstruktur, sejalan dengan latar belakang kepengurusan pura yang melibatkan unsur tempekan instansi pemerintah. Proses pemilihan tidak melalui metode tradisional seperti nyanjan, melainkan melalui penunjukan resmi dengan mempertimbangkan kualifikasi, pelatihan, dan wawasan calon Pemangku. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pura menempatkan profesionalisme dan kemampuan komunikasi lintas sektor

sebagai aspek penting dalam kepemangkuan. Adapun status dan peran Pemangku dalam manajemen ritual tidak hanya terbatas sebagai pelaksana upacara keagamaan, tetapi juga sebagai penghubung antara umat dan sistem birokrasi yang sering terlibat dalam kegiatan di pura. Pemangku dituntut untuk mampu menjalankan fungsi spiritual secara khidmat sekaligus menunjukkan sikap adaptif dan komunikatif dalam menghadapi umat dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat dan tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, manajemen Pemangku di Pura Agung Jagatnatha mencerminkan sinkronisasi antara nilai-nilai adat dan pendekatan modern, yang memperkuat fungsi pura tidak hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan budaya yang inklusif dan dinamis di tengah masyarakat Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah Rahmadania dan Hery Noer Aly (2023), *Implementasi Teori Hierarchy Of Needs Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Di Yayasan Cahaya Generasi Islam Kota Bengkulu*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Anwar, Deden Ruhyadi. (2010). *Peran Sentral Pemangku dalam Agama Hindu (Studi Kasus pada Pura Raditya Dharma Cibinong Bogor)*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Aryana Putra I Made, dkk, (2024). *Nila Pendidikan Agama Hindu dalam Acara Nyenuk pada karya Nyatur Ngenteg Linggih Padudusan Alit Tawur Panca Kelud di Merajan Sentana Pasek Toh Jiwa Samuan*, UHN IB Sugriwa Denpasar, Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu Jurusan Pendidikan Agama Fakultas Dharma Acarya.
- Bungin, Burharudin. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus*
- Cohen Bruce J. (2009) *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Duha, Timotius S.E., M.M. (2018). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Fatoni, Abdurrahmat H. (2011). *Metologi Penulisan & Teknik Penyusunan Skripsi. Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fayol, Henry, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985.
- Gulo, W. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Harmadi, J. (2005). *Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harvey, G. (Ed.). (2003). *Shamanism: A reader*. Routledge.
- Hasibuan, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)* (Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Ghalia Indah
- Isna Firdha Rahamawati, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta*
- Koentjaraningrat, 2009, *Sejarah Teori Antropologi I*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Masri (2021) , dkk, *Hubungan Model Budaya Organisasi dan Praktik Manajemen, Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi*, *Journal of Counseling, Education and Society*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Maslow, Abraham H. (2013). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT. PBP, Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ngurah I Gst Md, et al (1999), *Buku Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*, Departemen Agama, (Surabaya: PARAMITA, 1999), cet. I. Hal. 172
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Siagian, P. *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

- Salim, Agus (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana..
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Setiawan, H., & Kurniawan, F. (2017). Pengobatan Tradisional Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol.23, No.2, 57-66
- Shaw, Marvin E. (2000). *Teori-teori psikologi sosial*. Philip B. Costanzo, Sarlito Wirawan Sarwono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Silalahi, Ulber, *Asas-Asas Manajemen Bandung*, PT Refika Aditama, 2011, 189). Bass
- Sidemen, I. B. P. (2019). *Perangkat Pemujaan sulinggih Saiwa, Baudha, Waisnawa*. (i., Univesitas Negeri Hindu Indonesia Denpasar Bali.
- Subagyo, P Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Suhardana, Drs.K.M. 2006. *Dasar-Dasar Kepemangkuan*. Surabaya: Paramita
- Suhardi, 2018, "Pengantar Manajemen dan Aplikasinya", Yogyakarta, Gava Media)
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Terry, GR. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Bina Aksara.
- Udytama, I Wayan Wahyu Wira dkk (2022) *Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Pemangku Kayangan Tiga Berbasis Desa Adat di Bali*. Fakultas Hukum Universeitas Mahasaraswati Denpasar
- Wenten Made, 1999, *tetandingan Banten Manusa Yadnya*, Indrajaya, Singaraja
- Wiana, Drs Ketut, 2002, *Makna Upacara Yajna Dalam Agama Hindu*, Jilid I, Paramita, Surabaya
- Zuriah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.